

Tradisi *Riolo* Sebagai Resiliensi Komunitas: Praktik Sosial Masyarakat Adat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Dataran Tinggi, Gowa

Imamul Hak, Ibrahim

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: imamul.hak@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penyebaran pandemi Covid-19 berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, di mana survei BPS tahun 2020 menunjukkan pandemi menyebabkan krisis penghidupan bagi masyarakat perkotaan yang bekerja di sektor industri, pariwisata, dan pekerja informal. Sementara petani kecil, penggarap, dan buruh tani menjadi bagian terdampak di pedesaan. Penelitian ini berupaya melihat resiliensi masyarakat adat dan mekanisme adaptasi mereka dalam menghadapi krisis yang disebabkan oleh pandemi. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pemangku adat, beberapa tokoh masyarakat, anggota masyarakat adat. Peneliti menggunakan teori resiliensi komunitas dan teori praktik sosial sebagai pendekatan kritis yang berpegang pada hubungan dialektik antara struktur dan agensi dalam hubungan sosial. Penelitian ini menemukan bahwa solidaritas sosial di pedesaan menjadi kekuatan kunci bagi resiliensi masyarakat adat di dataran tinggi, Gowa dalam menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu, faktor ikatan sosial, relasi sosial berbasis produksi juga ditopang oleh nilai-nilai sosio-kultural yang masih dipraktikkan secara kolektif. Kemampuan masyarakat adat untuk bertahan dari dampak pandemi juga ditopang oleh berbagai usaha pertanian berbasis komoditas. Akan tetapi rantai produksi komoditas sebagai tumpuan pendapatan utama masyarakat adat di pedesaan sangat ditentukan oleh mekanisme pasar. Pada kondisi seperti itu, solidaritas berbasis kultur yang terkonfigurasi sebagai tradisi, menjadi mekanisme pertahanan alternatif bagi masyarakat adat di pedesaan.

Kata Kunci :

Tradisi Riolo, Resiliensi, Covid-19, Masyarakat Adat

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil survei sosial demografi dampak Covid-19 pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa masyarakat yang paling terdampak adalah masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal. Teru-

tama kelompok berpendapatan rendah (penghasilan di bawah Rp 1.800.000), dimana sektor pekerjaan yang paling terdampak yakni; pariwisata; transportasi dan perdagangan; serta penyedia akomodasi makan dan minum (Badan Pusat Statistik, 2020).

Data hasil survei BPS di atas terbatas pada kategori masyarakat bercorak industri di perkotaan. Keterbatasan ini dikarenakan metodologi survei yang dilakukan secara online sehingga berimplikasi pada kategori responden, yang juga diakui oleh BPS. Lalu, bagaimana dengan dampak Covid-19 di pedesaan yang bercorak agraris? Kategori masyarakat bagaimana yang paling terdampak?

Lembaga SMERU Institute melakukan penelitian di sejumlah desa untuk melihat dampak pandemi kepada petani atau kelompok yang bekerja di sektor pertanian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan petani yang memiliki lahan dan usaha pertanian lebih mudah menerapkan koping ekonomi, dengan memanfaatkan surplus hasil pertanian untuk menopang kebutuhan dan sumber pendapatan rumah tangga (Tamyis, Wikan, & Mawardi, 2021). Bentuk koping ekonomi antara lain adalah dengan menggarap lahan sendiri, menyebabkan hilangnya pekerjaan petani penggarap dan buruh tani. Dengan kata lain, efek domino pandemi di pedesaan berdampak langsung juga kepada petani kecil tak bertanah: petani penggarap dan buruh tani sebagaimana penjelasan di atas. Lantas, bagaimana cara petani yang terdampak itu bisa bertahan di masa pandemi? Atau bagaimana dengan petani yang menggarap lahan dan usaha pertanian sendiri (tanpa buruh tani) yang juga terdampak?

Kekurangan dua penelitian yang dibahas di atas karena tidak melihat aspek sosial-budaya. Kerentanan yang ditampilkan cenderung ekonomi-sentris. Oleh karena itu,

penelitian ini hendak menutupi celah yang dipaparkan dua argumen sebelumnya tetapi dengan mengamati petani kecil yang terdampak pandemi yang juga mengidentifikasi dirinya sebagai masyarakat adat. Pilihan pada kategori masyarakat adat sengaja dipilih untuk menunjukkan bahwa aspek ekonomi yang tidak ditopang oleh pranata sosial-budaya yang termanifestasi sebagai ‘tradisi’ yang dilestarikan oleh masyarakat, akan lebih rapuh jika mengalami gangguan baik yang alamiah (bencana alam) ataupun tidak alamiah (kebijakan negara atau tarikan-tarikan pasar), sehingga menyebabkan krisis sosial, ekonomi dan budaya. Dalam pandangan seperti itu, ekonomi dianggap sebagai faktor dominan karena seluruh gejala yang tumbuh dalam masyarakat serta tindakan sosial justru tertanam dalam sistem ekonomi (Prastowo, 2014). Oleh karena itu dalam tulisan ini, perspektif penulis berbeda dengan pendekatan ekonomistis semacam itu.

Pengalaman yang dialami masyarakat adat di pedesaan seperti argumentasi di atas bisa ditunjukkan oleh sejumlah praktik lokal yang juga bisa dibaca sebagai falsafah hidup (*local wisdom*) di beberapa daerah. Penelusuran Kresna yang dimuat di media Project Multatuli sebagai rangkaian reportase masyarakat adat dan lingkungan (26 Juni 2021) tentang Orang Baduy atau *Urang Kanekes* di Banten dan kisah suku Anak Dalam di Jambi mungkin bisa jadi contoh menarik, karena mereka mampu mengontrol dan membatasi efek penyebaran Covid-19 dengan cara melakukan karantina wilayah berdasarkan pedom-

an hidup *besesandion* bagi suku Anak Dalam dan atau *pikukuh* di Baduy.

Cerita suku Anak Dalam di Jambi bisa diajukan untuk menambah pengalaman dan pelajaran berharga terkait upaya masyarakat adat beradaptasi dan melakukan resiliensi komunitas. Jadi ketika mendengar kabar tentang penyebaran wabah Covid-19 mulai meningkat, dengan segera pimpinan adat memerintahkan untuk melakukan *besesandion*, atau perintah masuk ke dalam hutan untuk melakukan karantina tanpa ada yang berani melanggar karena hal itu merupakan perintah adat. Penyebab lainnya didasari oleh ingatan komunal akan wabah campak yang dulunya menewaskan puluhan orang anggota suku mereka.

“Pikukuh orang Baduy yang dijadikan pedoman hidup dalam merefleksikan penyebab dan dampak Pandemi ini yaitu; *“gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak*, artinya gunung jangan diratakan, lingkungan jangan dirusak”. Bagi orang Baduy, inti *pikukuh* yang dipegang teguh sebagai konsep agama dan adat terpenting adalah “tanpa perubahan apa pun”, seperti yang tertuang dalam ungkapan dalam bahasa lokal *lojor teu meunang dipotong, pendek teu meunang disambung* artinya “panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung” (Permana, 2009).

Kearifan lokal yang juga penting ditampikan di sini adalah tradisi orang Boti di Nusa Tenggara Timur yang memiliki aturan adat yang berfungsi sebagai model ketahanan pangan dan perlindungan dari bencana yang terwujud dalam tradisi *Ume*

Kbubu. Penelitian Iswanto (2021) terhadap orang Boti memahami bahwa tradisi, aturan adat dan kearifan lokal orang Boti mampu menjadi mekanisme kultural dalam mengantisipasi krisis dan bencana. Hal itu dimungkinkan karena sistem adat mereka yang membatasi diri dengan orang luar (karena perbedaan kepercayaan-*Halaika*), penataan rumah yang letaknya tidak berdekatan, pemantauan dalam sistem sosial yang ketat, interaksi sosial yang dibatasi, dan pola hidup yang sederhana (Iswanto, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Terkait dengan pengalaman masyarakat adat untuk melakukan adaptasi dan upaya resiliensi digambarkan oleh studi Sunarno dan Sulistyowati (2021) yang mengkaji nilai dan perilaku sosial dalam konteks resiliensi komunitas di masa pandemi Covid-19. Penelitian yang dilakukan di Desa Tempurejo, Kec. Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Tengah, ini mampu melakukan kelentingan komunitas karena adanya rasa memiliki (*sense of belonging*) antara sesama warga yang berada di dalamnya. Bentuk-bentuk perilaku sosial yang dijalankan secara komunal oleh anggota komunitas, yaitu: *pertama*, gotong royong yang semakin menguat sejak masa pandemi. Para warga rutin melakukan siskamling dalam menjaga keamanan lingkungan. *Kedua*, musyawarah yang berlangsung untuk mendesiminasi kebijakan pemerintah daerah tentang perlindungan dan penyebaran pandemi. *Ketiga*, keselarasan manusia dengan alam, di mana wilayah desa berupa persawahan dan hutan sebagai basis peng-

hasilan utama warga (Sunarno & Sulistyowati, 2021). Sayangnya, penelitian ini kurang mendalam melihat bentuk nilai dan perilaku sosial masyarakat yang berkaitan dengan basis produksi dan ketahanan pangan komunitas di pedesaan yang menjadi penopang utama mereka menghadapi krisis sebagai dampak pandemi.

Fenomena resiliensi pada masyarakat tradisional juga diamati oleh Ayu Meita Ningsih berjudul “Fenomena Resiliensi Suku Semende Desa Aromantai”. Penelitian lapangan ini menunjukkan bahwa tradisi sebagai landasan nilai paling utama yang berlaku di suku Semende untuk menjadi pedoman hidup, utamanya untuk memotivasi perilaku kelompok untuk bangkit dalam menghadapi segala macam persoalan yang menimpa mereka disebut *guci*. Kerawanan yang sering dihadapi oleh suku Semende adalah bencana alam atau longsor. Dengan diinternalisasinya nilai spritual *guci* sangat membantu anggota komunitas Semende untuk bangkit dari situasi krisis paska bencana alam. Prinsip mendasar dari nilai atau tradisi adat itu menekankan agar setiap orang harus menjaga keharmonisan hubungan dan tolong-menolong antar mereka dengan tidak menjadi terpuruk atau meninggalkan kampung ketika bencana terjadi (Ningsih, 2019).

Fokus utama penelitian ini ingin melihat pola resiliensi komunitas masyarakat adat di masa pandemi Covid-19 dan mekanisme adaptasi atas situasi krisis yang disebabkan oleh Pandemi. Masyarakat adat yang penghidupannya sangat bergantung

pada produksi komoditas pertanian (hortikultura), mengalami kerugian yang sangat mempengaruhi pendapatan dan penghasilan utama mereka sebagai petani produsen kecil.

Untuk itu, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana praktik sosial masyarakat adat di dataran tinggi, Kabupaten Gowa memungkinkan kelentingan hidup yang berpegang pada nilai-nilai tradisi leluhur (*riolo*), selama masa pandemi Covid-19? Berdasarkan rumusan permasalahan umum di atas, adapun pertanyaan kunci dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana masyarakat adat melakukan proses adaptasi dari krisis sebagai dampak pandemi? Bagaimana tradisi memungkinkan praktik sosial sebagai resiliensi masyarakat adat di pedesaan?

TINJAUAN TEORETIS

Landasan teoretis yang dipakai dalam memahami fakta lapangan yakni teori resiliensi komunitas dan teori praktik sosial. Resiliensi atau kelentingan merupakan suatu kemampuan individu juga kelompok untuk bangkit dari kondisi yang berat dan mampu mengatasi kondisi tersebut. Dengan kata lain resiliensi adalah kemampuan beradaptasi atas perubahan. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, mengkaji kemampuan masyarakat adat bertahan dan keluar dari situasi krisis tersebut. Termasuk memahami bagaimana praktik adaptasi selama pandemi ini menjadi penting sebagai suatu studi kasus yang kontemporer.

Menurut Carri dalam Nasdian, dkk, resiliensi komunitas adalah kemampuan yang mencerminkan gagasan ‘adaptasi’ untuk mengatasi masalah serta kesulitan (Nasdian, Pandjaitan, & Barlan, 2020). Komunitas kemudian menyesuaikan diri dengan kesulitan dengan cara mengubah fungsinya atau dengan memakai sumberdaya dengan cara yang inovatif. Dengan memiliki kemampuan itu, komunitas kemudian bisa dikatakan melakukan: (1) resiliensi adalah kemampuan bersifat inheren dan dinamis dari komunitas; (2) kemampuan beradaptasi adalah inti dari resiliensi; (3) setiap proses adaptasi harus mensyaratkan fungsi memperbaiki komunitas; (4) resiliensi dimaknai dengan cara yang memungkinkan langkah antisipatif yang berguna terkait kemampuan masyarakat untuk pulih dari kesulitan.

Sementara Mariyani, Pandjaitan, dan Sihalo yang mengikuti pendapat Norris, dkk., menjelaskan bahwa resiliensi komunitas merupakan suatu proses menghubungkan jaringan kapasitas adaptif yang meliputi empat instrumen utama yaitu pembangunan ekonomi, modal sosial, informasi dan komunikasi, dan kompetensi komunitas, dengan sumberdaya yang dimiliki oleh komunitas guna beradaptasi setelah terjadi krisis (Mariyani, Pandjaitan, & Sihalo, 2019). Atau dengan kata lain, resiliensi komunitas merupakan gagasan tentang bagaimana masyarakat bertahan menghadapi tekanan dan tantangan hidup melalui fungsi relasi sosial. Adapun Bruneau, dkk. mendefinisikan resiliensi komunitas sebagai kemampuan unit sosial, seperti organisasi atau masyarakat untuk

mitigasi bencana dan melakukan agenda pemulihan dengan cara meminimalkan gangguan (Bruneau, et al., 2003).

Berangkat dari sejumlah pengertian tentang resiliensi komunitas yang dipaparkan di atas, konsep resiliensi komunitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki secara sosial, juga kolektifitas untuk bertahan dan bahkan melakukan sejumlah kemajuan paska mengalami krisis, tekanan dan semacamnya. Daya kelentingan tersebut hanya bisa diidentifikasi setelah melalui suatu pengalaman yang mempengaruhi stabilitas, kenormalan, bahkan kondisi umum yang dinamis.

Fenomena umum yang biasa kita saksikan ketika masa pandemi ini, utamanya yang terjadi di pedesaan, seperti: macetnya sirkulasi perdagangan komoditas pertanian yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan utama petani produsen kecil, buruh tani, pedagang atau pengepul, dan dampak krusial lainnya. Kondisi seperti itu juga yang penulis temukan di pedesaan yang menjadi lokasi penelitian. Salah satu cara masyarakat adat bisa bertahan dan keluar dari krisis pandemi itu karena kemampuan mengelola sumberdaya yang tersedia berpedoman pada tradisi leluhur-kearifan lokal sebagai tata kelola ruang hidup bersama. Pilihan lainnya menjual surplus hasil pertanian yang biasanya digunakan untuk konsumsi. Secara umum, penulis melihat kemampuan dan kelentingan itu didasari oleh tradisi, relasi sosial, atau karena sumber penghasilan masyarakat tidak bertumpu pada satu produksi komoditi saja, terdapat beragam pola

produksi yang mampu menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga.

Untuk memahami pola, proses dan dinamika dalam sistem sosial yang bekerja itu, peneliti menggunakan teori praktik sosial sebagai pendekatan yang menekankan pada hubungan dialektik antara struktur dan agensi dalam hubungan sosial yang konkrit. Pendekatan ini menganggap bahwa peneliti bisa melibatkan diri sebagai pengalaman langsung guna memahami hubungan mereka dalam komunitas tersebut, sembari menjalani berbagai pengalaman yang berbeda. Dengan kata lain, fenomena di masyarakat bisa dipahami melalui relasi sosial, dimana di dalam relasi tersebut terdapat proses produksi yang mempengaruhi dinamika sosio-kultural masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu (D'Andrea, 2013).

Teori praktik sosial cukup berbeda secara konseptual dengan teori solidaritas mekaniknya Durkheim yang menjelaskan suatu ikatan sosio-kultural yang mengikat antara masyarakat bercorak kekeluargaan, perpuakan dan kekerabatan. Relasi sosial yang dibentuk oleh model solidaritas mekanik oleh Durkheim ini cenderung melihat bentuk pranata sosial masyarakat secara fungsional, tetapi mengabaikan struktur lain yang berfungsi sebagai faktor determinan dalam perubahan sosial. Untuk itu, praktik sosial sebagai pendekatan teoritik yang digunakan penelitian ini dapat membantu dalam menyusun kerangka pemikiran dan alat analisa dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kondisi masyarakat adat sebagai kelompok yang rentan tetapi mampu bertahan dari krisis selama masa pandemi. Selain itu, sikap pembelaan (*positioning*) dalam penelitian lapangan ini diharapkan mampu berkontribusi bagi upaya perjuangan akan pengakuan (*recognition*) hak-hak masyarakat adat dari negara, dimana sampai artikel ini dibuat belum punya kepastian yuridis. Artikulasi tersebut senada dengan kompleksitas yang diamati oleh beberapa *scholar* yang melihat dinamika masyarakat di pedalaman semakin tereksklusi karena kehilangan akses, dan kedaulatan atas ruang hidup komunalnya (Li, 2002; Siscawati, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memahami bagaimana proses masyarakat adat yang terlibat dalam praktik dan pola resiliensi selama masa Pandemi Covid-19. Masyarakat adat yang dimaksud adalah masyarakat adat Pattalassang di desa Pao dan Teko di desa Manimbahoi yang tersebar di dua kecamatan yakni, Tombolopao dan Parigi. Kedua kecamatan ini terletak di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti akan menggunakan metode etnografi dengan tinggal di kampung bersama komunitas untuk memahami, mengamati dan mempelajari aktivitas harian mereka, sehingga data-data yang diperoleh lebih realistis dan mendalam, serta menggambarkan realitas yang sesungguhnya (emik). Penelitian ini dilaksanakan selama Lima bulan terhitung dari bulan Juli sampai November 2021.

Untuk mengaplikasikan suatu metode etnografi, seorang peneliti harus belajar tentang kebiasaan ataupun budaya yang ada di daerah di mana penelitiannya dilakukan. Menurut Spradley, hal ini menjelaskan bahwa etnografi merupakan sebuah pendekatan untuk mempelajari kehidupan sosial dan budaya sebuah masyarakat secara ilmiah melalui prosedur-prosedur penelitian yang telah ditetapkan dan digunakan untuk menginterpretasi pengalaman, tingkah laku dan pola pikir masyarakat (Spradley, 1997). Metode etnografi merupakan metode penelitian serta menjadi bagian dari metode penelitian kualitatif.

Teknik dan proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, yaitu: *pertama*, observasi lapangan untuk mengidentifikasi lokasi penelitian. *Kedua*, wawancara mendalam terhadap pemangku adat, beberapa tokoh masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Gowa dan masyarakat setempat yang memahami dan memiliki pengetahuan tentang adat *Sampulu Arua* dan dinamika sosial komunitas selama masa pandemi. Adapun mekanisme pemilihan informan dilakukan dengan teknik *snowball*, yaitu mengikuti informasi dan petunjuk dari informan sebelumnya untuk menuju kepada sumber pengetahuan atau informan selanjutnya. Metode ini merupakan cara untuk memahami dan mendekati sudut pandang tinjauan dalam melihat persoalan-persoalan juga pertanyaan yang diajukan peneliti. *Ketiga*, studi kasus. Pada dasarnya, memahami, menelusuri, dan mengeksplorasi momentum, peristiwa,

dan aktivitas subjek tinjauan baik sebagai individu dan anggota komunitas dalam proses interaksi sosialnya. *Keempat*, studi pustaka yang berguna untuk memperkaya referensi peneliti dalam menuliskan dan mengembangkan narasi etnografi, terutama untuk menemukan konteks, posisi dan kontribusi penelitian dalam dan bagi ilmu sosial humaniora kontemporer.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis hendak menggambarkan situasi krisis yang dialami oleh masyarakat adat di pedesaan karena dampak pandemi Covid-19. Krisis yang dimaksud antara lain: hilangnya pekerjaan utama, menurunnya pendapatan dari usaha pertanian dan macetnya akses distribusi ke pasar menyebabkan kerugian material. Anggota masyarakat adat yang terdampak sepenuhnya bekerja dalam sektor pertanian dan usaha pertanian sebagai petani produsen, buruh tani dan penyakap. Peneliti melakukan pengamatan pada sejumlah masyarakat adat yang terdampak pandemi di dusun Pattiro, dusun Baleanging Desa Manimbahoi, kec. Parigi dan Masyarakat adat di desa Pao, Kec. Tombolo Pao, kab. Gowa, Sulawesi Selatan.

Dari Krisis ke Adaptasi Masyarakat Adat di Masa Pandemi

Pada tulisan ini, penggunaan kategori petani kecil dan sekaligus menjadi bagian dari masyarakat adat di pedesaan, digunakan secara bergantian tapi merujuk subjek-subjek tinjauan yang sama. Oleh karena itu, penulis dipandu oleh pertanyaan utama yakni bagaimana kondisi masyarakat adat

yang bergantung pada pertanian dan usaha pertanian yang terdampak pandemi di pedesaan?

Salah seorang informan bernama Hasan di Dusun Pattiro, Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi, pernah membuang komoditi hasil panen dari lahan pertaniannya ke sungai, disebabkan oleh harga jual yang sangat rendah karena tidak bisa terdistribusi ke pasar. Adanya kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan di masa pandemi membuat para pengepul di desa yang biasa membeli hasil pertanian tidak bisa berangkat ke Makassar. Pengepul di tingkat desa berperan untuk membawa komoditas yang berasal dari desa ke pedagang-pedagang di pasar-pasar besar di kota. Hasil dari usaha pertanian petani di desa dan secara umum di dataran tinggi Gowa, memasarkan komoditas pertanian di pasar-pasar yang ada di Kota Sungguminasa, kab. Gowa dan di Kota Makassar.

Kejadian membuang hasil pertanian di sungai seperti dilakukan oleh Hasan di atas juga dialami oleh sejumlah petani kecil lainnya. Dari peristiwa itulah sebutan *daeng buang*, sebagai gambaran kejadian membuang hasil pertanian yang tidak bisa terjual karena harga yang rendah mulai populer di kampungnya. Menurut Hasan, *daeng buang* mampu menerima berapa pun jumlah hasil pertanian, selama petani menginginkan. Begitulah Hasan dan teman-temannya sesama petani kecil saling menghibur di tengah situasi sulit karena ketiadaan hasil atau untung dari usaha pertanian yang menjadi penopang pengha-

silan utama mereka sebagai petani hortikultura.

Kondisi di atas merupakan cerminan dari situasi krisis yang ditimbulkan oleh karena pandemi. Di satu sisi, petani tetap memproduksi komoditas pertanian, seperti cabai dan tomat. Namun di sisi lain, komoditas tersebut tidak bisa sampai ke tangan konsumen atau tidak bisa dijual ke pasar. Adanya pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terjadi saat pandemi membuat masyarakat tidak dapat dengan bebas berkumpul dan berinteraksi secara langsung di tempat-tempat umum seperti di pasar. Alhasil, hasil panen dari petani tidak mampu diangkut oleh pengepul yang biasa membeli komoditas hasil usaha pertanian di desa.

Macetnya arus distribusi komoditas hasil pertanian dari produsen di desa ke konsumen di kota, menimbulkan kerugian yang sangat terasa bagi petani kecil seperti Hasan dan tentu saja semua petani kecil yang bergantung pada lancarnya distribusi hasil dari usaha pertanian di desa yang diperantarai oleh pedagang atau tengkulak desa bisa sampai ke pasar. Karena hal itu petani kecil seperti Hasan hanya bisa pasrah dan merelakan hasil panen cabai dan tomatnya menumpuk. Pada akhirnya, hasil panen yang membusuk dibuang ke sungai, yang diplesetkan dengan istilah *daeng buang* sebagai pelipur lara belaka.

Meskipun dalam pemenuhan makan setiap hari bagi masyarakat di dusun Pattiro, ketika hasil usaha pertanian tidak meng-

hasilkan keuntungan sebagaimana biasanya, Hasan dan keluarganya masih bisa memenuhinya. Hal itu karena Hasan dan petani-petani hortikultura lainnya masih memiliki beberapa petak sawah yang menurutnya cukup untuk menutupi kebutuhan makan setiap hari seluruh keluarganya sampai panen berikutnya. Bahkan terkadang jika butuh uang tunai, bisa diperoleh dengan cara menjual beras. Begitu pula keperluan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan lainnya, seperti: acara seremoni, pengeluaran rutin harian dan bulanan, biasa sekolah dan lain sebagainya. Selain sawah sebagai sarana penghidupan utama masyarakat adat di dusun Pattiro, Hasan juga masih memiliki kebun kopi yang biasanya dipanen setiap tahun dan dianggap sedikit membantu kebutuhan finansial rumah tangganya.

Selang beberapa bulan masa pandemi dan kebijakan pembatasan sosial, masyarakat adat di Pattiro mendengar bahwa komoditas cabai dan tomat sudah dibeli di Makassar, informasi itu didapatkan dari tetangga kampungnya dan pedagang itu sendiri. Kemudian dia dan beberapa petani lainnya memulai kembali untuk menanam komoditas karena mereka menganggap sudah berpeluang untuk dijual lagi.

Hasan dan beberapa temannya selalu siap untuk mengambil resiko untuk memulai kembali menanam jenis tanaman tersebut, karena kopi hanya dipanen satu kali dalam setahun, begitu pun dengan padi. Mereka menganggap jika secara terus menerus menjual beras untuk menutupi kebutuhan setiap hari tidak akan mencukupi. Mereka

secara terpaksa menggadaikan sawah, menjual ternak, dan mengambil uang KUR di BRI sebagai modal, untuk bertani hortikultura kembali, dan sedikit disisipkan untuk keperluan finansial rumah tangganya, seperti sekolah dua orang anaknya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Harga kebutuhan input produksi pertanian selama masa pandemi semakin naik, harga bibit cabai dalam satu kantong mencapai Rp. 200.000, padahal sebelum pandemi Rp. 185.000/kantong. Begitu pun dengan harga pupuk dasar naik menjadi Rp. 145.000/sak, yang sebelumnya seharga Rp. 130.000/sak, dan pupuk lanjutan merk Mutiara, pupuk yang biasa digunakan setelah tanaman dipindahkan dari lokasi pembibitan ke ladang, juga ikut naik dengan harga Rp. 500.000/sak, yang biasanya Rp. 380.000/sak.

Berdasarkan kondisi yang dialami oleh Hasan dalam satu kali tanam cabai, biasanya menghabiskan bibit dua kantong, dengan pupuk sebanyak 10 sak, dan biaya sewa traktor Rp 400.000 untuk membuat ladang, gaji orang yang biasa dipanggilnya untuk menanam Rp.80.000/hari sebanyak lima orang, itu berlangsung selama tiga hari penanaman, begitu pun ketika melakukan panen. Hasan kemudian menghitung dan memperkirakan bahwa ongkos produksi cabai yang dikeluarkan mulai dari pembibitan sampai panen sekitar Rp. 7.000.000, belum termasuk tenaga sendiri dan istrinya yang merawat setiap hari.

Jika tanaman cukup subur, hasil panen dengan bibit dua kantong terkadang menc-

apai dua ton atau lebih dengan harga Rp. 3.000/kg. Menurutnya sebagai seorang petani hortikultura di masa krisis seperti ini, bertani itu seperti orang bermain judi karena tidak ada kepastian. Bertani dengan model seperti ini, membutuhkan biaya yang banyak, dengan ketidakpastian harga karena jalur distribusi ke pasar terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali, kondisi terburuk adalah membuang hasil panen yang tidak bisa terjual—seperti cerita *daeng buang* di atas, menjadi istilah harian bagi masyarakat di Dusun Pattiro (Desa Manimbahoi) yang seyogyanya semua orang tidak menginginkannya.

Pengalaman serupa juga dialami oleh masyarakat adat Pattalassang di Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao, yang mata pencaharian utamanya bergantung pada usaha pertanian kecil sebagai petani penyakap atau penggarap lahan milik orang lain. Hendra merupakan salah satu orang dari banyaknya masyarakat adat terdampak pandemi Covid-19. Pada fase awal kemunculan Covid-19 di Indonesia dengan pembatasan sosial sebagai kebijakan negara untuk memutus mata rantai virus tersebut, berdampak serius bagi kehidupan Hendra sebagai masyarakat adat yang berada di pedalaman Kabupaten Gowa. Komoditi yang ia tanam seperti; kol, sawi, dan daun bawang, tidak dipanen dan dibiarkan tinggal membusuk di ladangnya. Pengepul di desa tidak membeli hasil panennya, karena tidak memiliki tujuan untuk dijual di pasar di Makassar. Itulah alasan mengapa Hendra tidak memanen hasil usahanya karena persoalan demikian.

Biaya produksi yang tinggi untuk bertani hortikultura, mengharuskan dia untuk tidak menanam lagi, meskipun dia sudah mendengar kabar dari petani-petani lainnya, bahwa panen berikutnya, pengepul di desa akan membeli hasil pertaniannya. Akan tetapi, ia tetap memutuskan untuk tidak menanam lagi sayuran dalam waktu dekat, karena tidak memiliki modal.

Untuk mendapatkan pendapatan harian, Hendra menjadi buruh tani selama delapan bulan dengan menetap di desa Pangajiang, Kecamatan Parigi. Saat itu dia menanam porang karena menurutnya porang tidak memiliki biaya produksi yang tinggi. Selain menanam porang, Hendra terkadang ikut membantu saudaranya membuat peti buat boks sayuran dengan upah Rp. 7.500/peti, hal itu dilakukan untuk menambal kebutuhan sehari-harinya.

Pengalaman hidup yang dialami seperti kisah di atas menunjukkan betapa dalamnya krisis yang ditimbulkan oleh pandemi terutama mereka yang tergolong sebagai masyarakat adat, di mana mereka sangat menggantungkan hidupnya pada produksi pertanian. Kerentanan secara ekonomi dan sosial bisa terjadi karena petani kecil seperti Hasan dan Hendra hanya bertumpu pada penguasaan tanah yang kecil dan terbatas. Ditambah oleh tidak berdayanya mereka atas harga komoditas yang mereka tanam, semuanya ditentukan oleh transaksi di pasar.

Jika petani kecil seperti mereka tidak bisa mendapatkan untung dari surplus produksi komoditas yang mereka kelola, maka me-

reka secara otomatis kehilangan pendapatan utama. Dampak lainnya yang kemudian mereka rasakan adalah tidak punya modal lagi untuk memulai produksi komoditas kembali, ketidakpastian penjualan hasil pertanian adalah satu persoalan mendasar dari situasi yang diciptakan oleh Pandemi, ketidakmampuan untuk menghardirkan modal untuk produksi merupakan efek lanjutan dari situasi krisis tersebut.

Pengalaman lainnya dirasakan oleh Saparuddin sebagai masyarakat adat Teko di Dusun Balleanging, Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi. Dia terpaksa mengerjakan sawah milik tetangganya karena sawah yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup keluarganya. Selain mengerjakan sawah orang lain dengan sistem bagi hasil, dia juga menyewa lahan kebun untuk ditanami tomat. Seperti kalkulasi biaya input produksi yang diuraikan Saparuddin, sebagai petani gurem, di Baleanging pada 18 September 2021 berikut.

Biaya sewa lahan sebesar Rp. 700.000/tahun, ditambah biaya input produksi, bibit, pupuk dan pestisida sebesar Rp. 1.500.000/sekali musim tanam. Dengan biaya modal produksi itu, Saya mampu menghasilkan keuntungan yang jadi pendapatan sebesar Rp. 10.000.000, dengan harga tertinggi sebesar Rp.100.000/kantong. Itu hitungan sebelum pandemi.

Akan tetapi selama pandemi berlangsung, pembatasan aktivitas di pasar dan proses distribusi komoditas sayuran menjadi sangat terganggu, membuat Saparuddin ber-

hitung ulang dan tanpa berpikir panjang menjual tomatnya dengan harga murah, hanya cukup untuk menutupi modal produksi saja itupun masih terhitung rugi. Pada masa pembatasan sosial sebagai kebijakan menurunkan penyebaran virus corona, harga komoditas seperti tomat menyentuh harga terendah, hanya dihargai Rp. 5.000/kantong. Dengan jatuhnya harga komoditas itu "*janganakan untung, modal saja tidak kembali*" kata Saparuddin, petani tomat di Dusun Balleanging, Parigi pada 18 September 2021.

Kerugian produksi yang dialami petani kecil seperti Saparuddin tentu saja juga berlaku bagi petani-petani produsen komoditas kecil lainnya. Tetapi tentu saja bisa berbeda tingkat valuasi untung-rugi masing-masing petani produsen. Hilangnya sumber pendapatan utama selama masa pandemi setidaknya bisa ditutupi dengan menjual beras, yang itu hanya bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan sekunder, seperti biaya sekolah, listrik dan lainnya. Efek lain yang ditimbulkan oleh macetnya perdagangan komoditas pertanian ini yaitu ketiadaan biaya untuk melakukan produksi lagi, untuk membeli input-input produksi pertanian utama. Karena itu, agar bisa punya modal produksi lagi, solusinya adalah dengan meminjam kredit di BRI atau dikenal dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program pemberian utang lunak berbunga rendah ini diangsur setiap 6 bulan selama 3 tahun. Saparuddin telah membayar angsuran sekali sebesar 6 juta rupiah. Menurutnya, program kredit usaha rakyat ini sang-

at membantu untuk memulai kembali usaha pertanian komoditi yang terpuruk karena situasi pandemi yang memukul petani berlahan kecil seperti dia. Di desa selain KUR itu, pilihan untuk meminjam hanya kepada pengepul atau rentenir saja. Pilihan yang disebut terakhir tentu saja sangat dihindari karena beban bunga yang sangat tinggi, yakni 10% perbulannya.

Dampak langsung pandemi bagi masyarakat adat di pedesaan yang pekerjaan utamanya sebagai petani, atau petani berlahan kecil, sangat besar, utamanya di aspek ekonomi. Berkurang bahkan hilangnya sumber pendapatan utama petani menyebabkan mereka menjadi kelompok yang rentan menjadi miskin. Namun, krisis tersebut tidak menjadi fakta umum, terutama di pedesaan karena masih berlakunya suatu pranata sosial di kampung yang bisa dilihat dalam bidang pertanian sawah, di mana hal itu juga cukup membantu petani penggarap seperti Saparuddin untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Pranata sosiokultural tersebut tergambar dalam sistem bagi hasil atau disebut *tesang* dalam bahasa lokal, merupakan sistem sosial yang cukup membantu petani berlahan kecil agar bisa meningkatkan atau menghasilkan surplus hasil pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Untuk penjelasan lebih jauh lagi akan dibahas bentuk-bentuk tradisi lokal yang membentuk suatu praktik sosial pada masyarakat adat, di mana penulis berpendapat bahwa tradisi yang masih berlaku sebagai sistem sosial tersebut berakar pada prinsip atau tata nilai yang mengkondisikan relasi sosial di masyarakat.

Tradisi Riolo sebagai Resiliensi Komunitas: Pengalaman Masyarakat Adat Teko di Manimbahoi

Bentuk dari praktik sosial yang hendak dijelaskan pada bagian ini adalah melihat eksisnya beragam nilai-nilai adat sebagai dasar dari tradisi yang berlaku secara sosial di masyarakat. Tradisi yang dimaksud bisa terus eksis dan berlangsung terus menerus dari generasi ke generasi, dimungkinkan karena berperannya institusi adat yang terwujud dalam struktur adat dua belas (adat *sampulo arua*). Identitas lain secara geografis juga disebut masyarakat adat Teko di Manimbahoi. Jadi, masyarakat adat Teko juga dikenal dengan adat *sampulo arua*. Struktur dan pemangku adat ini berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal atau bentuk pengetahuan lokal tentang pentingnya menjaga solidaritas sosial antar anggota masyarakat, bermusyawarah untuk mencari jalan keluar dari suatu persoalan, etika memperlakukan alam, dan ajaran-ajaran leluhur lainnya.

Ahmad Hado salah satu pemangku adat *sampulo arua* bercerita ketika penulis berada di atas rumah panggung peninggalan orang tuanya, di Dusun Baleanging. Hado menceritakan tentang asal usul masyarakat adat Teko yang ada di Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi:

“Nenek moyang mereka sebenarnya berasal dari kampung yang sekarang dikenal dengan Sinjai Barat. Di sana juga nama kampungnya Teko Toa. Nenek-nenek kami dulu bermigrasi mencari lahan baru untuk pemukiman. Kalau menurut sejarah tutur

yang diceritakan, *Sombaya ri Gowa atau Raja Gowa yang memberikan kawasan yang sekarang ini kami huni, kalau nama Desa Manimbahoi di sini diambil dari nama kampung yang ada di Sinjai, tempat nenek-nenek kami berasal*” (Hado, 2021).

Kepulan uap kopi menusuk indra penciuman, aroma khas kopi hitam yang gurih dan pahit seperti menghangatkan tubuh dari cuaca dingin yang mulai kami rasakan malam itu. *“Di sini itu kami minum kopi asli,”* kata Hado, begitu biasa dia disapa. Keramahan dan kebaikannya karena bersedia menampung penulis dan rombongan untuk bermalam di rumahnya selama melakukan penelitian lapangan, cukup memberikan kesan mendalam. Selanjutnya pembuka obrolan dengan membahas tentang kopi-sesuai hidangan tuan rumah kepada kami. Kopi adalah salah satu komoditas yang dihasilkan masyarakat di desa, lumayan untuk pendapatan tambahan. *“Cuma cara pemetikan orang di sini itu yang masih terlalu dini. Biar masih hijau sudah dipetik. Harusnya kan nanti kalau merah baru dipetik. Tapi begitulah, alasannya daripada dimakan monyet jadi petani panen lebih awal,”* lanjut Hado.

“Kebiasaan itu yang membuat harga kopi di sini murah, biji kopi yang sudah kering dijual ke pengepul. Tapi kalau punya jaringan sendiri di kota atau pemilik warkop itu lumayan bisa lebih mahal sedikit. Saya punya kenalan yang jadi pembeli. Tapi harus disortir dulu baru dijual” terang Hado.

Terkait dengan kopi sebagai komoditas sebelum introduksi pertanian hortikultura (cabai dan tomat) cukup memiliki nilai historis bagi masyarakat di dataran tinggi seperti di Desa Majannang dan Manimbahoi, Kecamatan Parigi. Mereka mengingat dengan baik bahwa kopi adalah komoditi yang diperkenalkan oleh kolonial Belanda. Utamanya untuk jenis kopi robusta, karena itu penyebutan lain robusta dalam bahasa lokal disebut ‘kopi balanda’ atau kopi Belanda. Pemberian nama kampung seperti Dusun Borong Kopi juga seperti menegaskan suatu identitas tersendiri. “Borong kopi” di sini bisa berarti nama sebuah kampung-atau tempat, yang (banyak tanaman kopinya). Karena itu tanaman yang diperkenalkan oleh kolonial ini tidak sekedar menjadi tanaman komoditas dagang saja, tetapi ikut serta membentuk identitas kampung-kampung di dataran tinggi Gowa.

Pengelolaan kopi masih dilakukan secara sederhana: saat buah sudah matang berwarna merah ceri artinya sudah siap dipetik. Kemudian disortir dengan cara manual menggunakan wadah air di ember atau baskom untuk memisahkan buah yang berisi dengan yang kosong, hanya buah yang mengendap di dasar wadah yang diambil untuk kemudian dijemur selama dua atau tiga hari (pada proses ini, buah kopi disebut ceri) Setelah itu buah dikupas menggunakan mesin untuk memisahkan kulit luar dengan biji kopi. Setelah itu proses penjemuran biji kopi bisa memakan waktu berminggu-minggu tergantung cuaca. Setelah kering yang ditandai oleh warna biji kopi hijau kecoklat-coklatan (*green bean*),

maka petani melakukan penyortiran secara manual untuk meningkatkan kualitas agar harganya lebih mahal karena sudah melalui serangkaian proses standarisasi pengolahan kopi. Akan tetapi tidak semua hasil panen kopi dijual, sebagian disimpan untuk dikonsumsi sendiri.

Pada masa pandemi ketika masa pembatasan yang berimbas juga kepada pemasaran hasil panen tanaman cabai dan tomat. Kopi menjadi sandaran penting untuk menunjang pendapatan masyarakat yang hasil usaha pertanian tidak bisa terjual di pasar, karena distribusi penjualan kopi juga tidak normal, jalur distribusi ke konsumen di kota macet karena kafe-kafe mengalami imbas masa pembatasan sosial di kota. Pilihan terakhirnya adalah menjual beras untuk menopang penghidupan harian.

Selama masa pandemi yang membuat hasil tanaman komoditas pertanian menjadi tidak terjual di pasar, pilihan lain untuk mendapatkan uang tunai adalah menjual sebagian beras. Selain itu, komoditas kopi yang jadi andalan untuk menopang pendapatan uang tunai masyarakat. Selain untuk dikonsumsi sendiri, kopi yang pengolahannya masih tergolong tradisional ini bisa menjadi sumber pendapatan tambahan karena surplus hasil produktivitas kopi cukup besar di desa.

Kopi bagi masyarakat adat di Manimbahoi bukan hanya komoditas dagang semata. Kopi seperti menjadi bagian dari identitas karena nilai historisnya, begitu kuatnya kopi dalam peri-kehidupan masyarakat di

sana. Setiap ritual, pesta dan tradisi rutin yang dilakukan, kopi menjadi hidangan wajib. Artinya, kopi bukan hanya konsumsi harian tapi sudah menjadi bagian dari identitas kultural mereka.

Praktik-praktik adat masih dijalankan oleh dua belas pemangku adat seperti pertemuan tengah tahun atau mereka menyebutnya *ammuntuli ulu bara'*, *ammuntuli ulu timoro*, kemudian pertemuan tahunan disebut *a'bali sumanga'*, ketiga pertemuan tersebut dilakukan di rumah *pinati* atau di rumah adat *balla tinggia*. Adapun pembahasan di setiap pertemuan adat itu secara khusus membahas pengembangan pertanian masyarakat adat Teko' sebagai basis utama penghidupan mereka.

Pertama, ammontuli ulu bara', pertemuan ini dilakukan di awal saat memasuki musim hujan. Penentuan jadwal tanam bagi masyarakat, dan jenis bibit tanaman apa yang harus ditanam, adalah bagian dari pembahasan dalam pertemuan *ammuntuli ulu bara'*, selain itu, pertemuan tersebut dijadikan sebagai salah satu ritual sebagai upaya untuk menyambut musim hujan agar masyarakat terhindar dari musibah di kala musim hujan sedang berlangsung.

Penentuan jadwal tanam dalam pertemuan *ammuntuli ulu bara'* dilakukan agar semua masyarakat bersamaan menabur benih, hal ini dilakukan agar kelak di musim panen berlimpah dan menghindari serangan hama, serta beberapa kepercayaan lokal lainnya yang terintegrasi dalam praktik pertanian mereka.

Penjelasan logis mengapa harus bersamaan dipanen dan menanam, agar padi yang ditanam masyarakat tidak diserang hama, karena biasanya orang yang terlambat memanen tanamannya diserang lebih banyak. Dengan demikian jika masyarakat bersamaan jadwal tanamnya, asumsinya akan bersamaan pula dipanen, meskipun ada yang terlambat dua hari sampai empat hari, tetapi dampaknya tidak terlalu besar. Penentuan jadwal tanam tersebut berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama, jika penentuan jenis bibit yang harus ditanam telah disepakati dan serentak dipraktikkan.

Jenis bibit yang ditanam masyarakat adat Teko juga ditentukan dalam pertemuan *ammuntuli ulu bara'* karena, berbeda jenis bibit, waktu panennya pasti berbeda. Menurut Saleh, selaku pemangku adat Teko' (Galla Tangnga), di Dusun Borong Kopi pada 13 September 2021, mengatakan bahwa "*bibit padi lokal biasanya cukup lama bahkan mencapai delapan bulan, baru bisa dipanen. Seperti di Dusun Pat-tiro, padi lokal mulai dari jadwal tanam sampai panen, biasa mencapai delapan bulan. Tetapi di Dusun Borong Kopi hanya enam bulan*".

Jenis bibit yang sama tetapi dengan wilayah yang berbeda bisa menentukan jadwal panen masyarakat. Dengan itu, pertemuan *ammuntuli ulu' bara'* memiliki peran cukup penting untuk memfasilitasi pengembangan sektor pertanian masyarakat adat Teko di Manimbahoi.

Bibit murni dari pemerintah tidak cocok untuk ditanam di kampung. Dirinya per-

ah mencoba menanam dan tidak berhasil, karena jenis bibit ditentukan berdasarkan wilayah masing-masing, seperti di Borong Kopi. Bibit padi seperti *celebes* tidak bisa tumbuh untuk wilayah yang relatif lebih tinggi seperti di dusun Balleanging, tetapi bisa tumbuh di dusun Borong Kopi. Jenis bibit padi yang cocok untuk wilayah mereka, bibit padi *Buri* sejenis bibit padi lokal.

Para pemangku adat Teko tidak melarang masyarakat untuk menggunakan jenis bibit yang lain, namun para pemangku adat hanya memperingatkan masyarakat agar tidak menggunakan jenis bibit baru dengan porsi yang terlalu banyak, karena berpotensi tidak cocok dengan tanahnya. Sejumlah petani pernah mencoba melakukan hal tersebut sebagai pengguna pemula dengan menggunakan jenis bibit baru, dan ternyata tidak cocok untuk wilayahnya, karena padi yang dihasilkan pada saat itu mengalami padi jadi tidak berisi.

Penentuan bibit tersebut berlaku untuk semua jenis tanaman yang akan ditanam masyarakat. Mereka mengantisipasi untuk menggunakan jenis bibit baru karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan wilayah dan berdampak terhadap hasil panen yang gagal. Di dalam pertemuan *ammuntuli ulu' bara'* semua masyarakat yang hadir diwajibkan memakan *lappa-lappa* yang telah disediakan. Makanan tersebut merupakan makanan yang dulunya sering dikonsumsi oleh leluhur mereka, dengan keyakinan hasil dari apa yang ditanam akan berlipat ganda. Itulah arti dari kata *lappa-lappa*.

Kedua, pertemuan *ammuntuli ulu timoro*, dilakukan kala memasuki musim kemarau. Pertemuan ini untuk melakukan evaluasi atas proses dan hasil pertanian pada musim hujan sebelumnya, selain itu juga melakukan penentuan jenis bibit apa lagi yang harus ditanam, jadwal tanam, di akhir pertemuan ditutup dengan berdoa bersama agar saat di musim kemarau semua masyarakat yang bertani terhindar dari musibah.

Menurut Hado, pertemuan tersebut, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan jauh dengan pertemuan *ammuntuli ulu' bara'*, yang membedakannya adalah pada proses evaluasi untuk melihat apakah proses yang sudah dilakukan sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat pertemuan awal musim, selain itu juga membicarakan dan mencari solusi atas beberapa hambatan lainnya.

Ketiga, pertemuan tahunan, *a'bali sumanga'* yang memiliki arti membangun semangat masyarakat. Kegiatan tahunan ini juga untuk merayakan hasil panen masyarakat, atau pesta panen. Tradisi yang berlangsung setelah seluruh anggota masyarakat sudah melakukan panen padi, juga dilakukan sebagai bentuk syukur atas penghasilan atau keberhasilan panen mereka. Adapun jenis makanan yang disajikan dalam pertemuan tersebut tetap masih mengkonsumsi makanan leluhur mereka yaitu *lole* yang memiliki arti solidaritas. Mengkonsumsi *lole* pada saat *a'bali sumanga'* menurut keyakinan masyarakat adat Teko bahwa semua yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama semakin kuat dan juga mengingatkan perjuangan

leluhur mereka di masa-masa sulit pada masa yang lampau.

Selain itu pertemuan tahunan ini bertujuan untuk mengevaluasi semua pelaksanaan proses yang dilakukan disetiap pembahasan pertemuan setengah tahun tadi. Kemudian mengidentifikasi orang-orang yang tidak memiliki tanah atau orang-orang yang memiliki tanah tapi dianggap tidak mencukupi dalam pemenuhan sehari hari keluarganya, dan para pemangku adat mencarikan orang yang bersedia untuk agar tanahnya *ditesang* atau dikerjakan dan kemudian hasilnya dibagi antara pemilik dan penggarap. Kemudian mencari orang atau petani yang ingin menukar tanah garapannya dengan tujuan memperdekat yang jauh, dalam arti penyesuaian jarak antara rumah dengan lokasi sawah.

Bentuk praktik sosiokultural lainnya yang masih bertahan di kampung adalah *a'rera*, sebagai bentuk solidaritas sosial masyarakat adat Teko. Masyarakat adat Teko memahami proses bekerja secara kelompok dalam pertanian sawah dengan sebutan *a'rera'*. Gotong royong, saling membantu atau prinsip kerja resiprokal itu sudah berlangsung sejak dari nenek moyang mereka. Mereka secara turun temurun bekerja secara kelompok untuk menggarap sawah dan kebun dimana mayoritas masyarakat adat Teko melakukan hal demikian. Namun beberapa orang telah meninggalkan tradisi *arera* tersebut sejak masyarakat adat diperkenalkan modernisasi pertanian, juga mulai menerapkan sistem pertanian hortikultura sebagai sistem pertanian dominan di masyarakat adat Teko saat ini.

Di dalam sistem pertanian tertentu, seperti sistem pertanian hortikultura, praktik *a'ra* tidak digunakan masyarakat, karena sistem pertanian hortikultura telah menggunakan modernisasi teknologi pertanian seperti traktor, pompa air, yang dianggap mempermudah kerja pertanian mereka dan tidak memerlukan tenaga yang banyak. Tetapi *a'ra* sebagai kerja bersama dalam masyarakat adat Teko masih digunakan dalam sistem pertanian padi.

Seperti yang sering dilakukan Saleh dalam kelompok *rera*-nya. Di dalam kelompok Saleh terdapat dua puluh orang anggota *rera*. Setiap anggota secara bergiliran menggarap sawah dengan kelompok *rera*-nya masing-masing. Menurut Saleh itu lebih cepat dibandingkan jika dirinya bekerja secara tanpa bantuan yang lain. Sistem resiprokal pada tradisi *a'ra*, berlaku saat masyarakat menanam padi. Pekerjaan mendasar di sawah seperti mencangkul, mencabut bibit dan membantu mengangkut bibit dari lokasi pembibitan ke lokasi tanam di area persawahan. Begitupun dengan panen, kelompok *rera* masih terpakai seperti memanen hasil sawah, membantu mengangkut gabah ke rumah lumbung, dan membersihkan gabah untuk memasukkannya ke lumbung padi.

Kerja secara kelompok tersebut berlaku bagi masyarakat adat Teko sejak dari nenek moyang mereka. Menurut Nasi' (78 tahun) selaku orang yang dituakan di Dusun Pattiro, sekaligus salah satu peman-gku adat Teko, di Dusun Pattiro pada 12 September 2021, menjelaskan bahwa:

"Tradisi a'ra tersebut berlaku sebelum masyarakat mengenal sistem pertanian hortikultura. Kelompok rera diawali ketika masyarakat menanam kopi. Kala itu masyarakat bersamaan berjalan untuk menanam bibit pohon kopi di ladang dan kebun. Kebiasaan itu sampai kemudian belakangan berlaku dalam sistem pertanian padi, tetapi kelompok tersebut tidak digunakan dalam sistem pertanian hortikultura, seperti cabai dan tomat, yang kebanyakan petani tanam di Manimbahoi." (Nasi', 2021).

Menurut penjelasan di atas, bahwasanya kebiasaan bekerja kolektif di ladang dan sawah dimulai ketika masyarakat adat Teko melakukan penanaman bibit pohon kopi dan sawah ladang. Kebiasaan itu terus dilakukan saat model sawah irigasi teknis sudah diperkenalkan dan menggantikan sawah ladang. Akan tetapi, dalam perkembangan teknologi dan hal itu berimplikasi pada perkembangan usaha pertanian di pedesaan secara teknis mengikis praktik *a'ra*. Paling kelihatan pada pola pertanian hortikultura yang datang belakangan ini, di mana input teknologi pertanian mampu mengurangi dan membatasi input tenaga kerja manusia di dalamnya.

Pada masyarakat adat Teko terdapat banyak kelompok *rera*. Selain saling membantu, kelompok *rera* juga memiliki fungsi spasial, seperti contoh sawah milik Hado berada di dekat rumahnya Saleh yang notabeneanya berbeda dusun, begitupun dengan Saleh memiliki sawah di dekat rumah Hado. Kemudian mereka berdua sepakat untuk saling menukar sawahnya untuk digarap dalam waktu temporer saja,

dengan tujuan efisiensi jarak antar rumah dan lokasi sawahnya.

Deskripsi tentang tradisi *riolo* yang telah dijelaskan di atas mampu menjadi pedoman hidup dan kompas moral bagi masyarakat adat dalam menjalani kehidupan baik dalam relasi sosial dan relasi dengan alam sebagai ruang hidup bersama. Praktik sosial yang dimungkinkan oleh nilai-nilai kearifan lokal sebagai tradisi yang dijalankan secara komunal ini, pada dasarnya yang membuat masyarakat adat mampu mengatasi goncangan ekonomi selama masa pandemi. Bahkan menurut pengamatan penulis, praktik sosial itu sebagai faktor kunci upaya resiliensi masyarakat adat di pedesaan.

KESIMPULAN

Kemampuan masyarakat adat untuk bertahan dari krisis karena kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan utama selama masa pandemi adalah karena masih kuatnya ikatan solidaritas sosial di pedesaan. Selain hal tersebut, aspek produksi di sektor pertanian dan usaha pertanian berbasis komoditi yang beragam sangat berperan kunci dalam bertahan hidup selama masa pandemi.

Selain itu, yang cukup menarik untuk ditarik sebagai pelajaran hidup adalah peran pemangku adat dan anggota masyarakat adat sebagai struktur agensi yang aktif dan responsif atas fenomena aktual yang terjadi. Sehingga tradisi yang bertumpu pada relasi resiprokal menambah kemampuan resiliensi masyarakat adat yang ter-

dampak pandemi di pedesaan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengalaman masyarakat adat Teko di Desa Manimba-hoi.

Refleksi penulis berdasarkan pengalaman penelitian lapangan ini adalah kesadaran masyarakat adat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai ajaran leluhur ini bahwa menjadikan aspek ekonomi sebagai alas pada lini penghidupan tidak cukup dan seketika bisa menjadi rentan ketika terjadi goncangan, patahan dan krisis yang luas seperti fenomena pandemi yang kita rasakan saat ini.

Model penghidupan masyarakat yang ditopang oleh solidaritas, kolektifitas, dan kesadaran bersama atas ruang hidup yang ramah kepada manusia dan alamnya relatif lebih tangguh, adaptif, dan cenderung resiliensi dalam menghadapi krisis dan bencana, selama ruang hidup mereka yang juga sebagai sumber produksi utama anggota komunitas tidak dialihkan untuk kepentingan industri ekstraktif atau perkebunan skala besar dan mengeksklusi petani produsen kecil dari sarana produksinya lalu mekanisme itu memaksa mereka bertransformasi menjadi pekerja bebas atau terlempar ke kota menjadi pekerja upahan, seperti fakta empiris yang menimpa masyarakat adat di pedesaan. Untuk menguatkan kegelisahan di atas, Penulis menyuarakan agar negara bisa lebih berpihak kepada masyarakat adat di pedesaan melalui pengakuan identitas, eksistensi serta hak-hak yang melekat padanya melalui jalur regulasi dan kebijakan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada UIN Alauddin Makassar, terkhusus LP2M atas dukungan dana penelitian dalam program Litapdimas tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bruneau, M., Chang, S. E., Eguchi, R. T., Lee, G. C., O'Rourke, T. D., Reinhorn, A. M., Winterfeldt, D. v. (2003). A Framework to Quantitatively Assess and Enhance the Seismic Resilience of Communities. *Earthquake Spectra*, Vol. 19, No. 4, 733-752.
- D'Andrea, C. (2013). *Kopi, Adat dan Modal; Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah*. Yogyakarta: Sajogyo Institute, YTM dan Tanah Air Beta.
- Iswanto. (2021). Umu Khubu Sebagai Wujud Kearifan Lokal Masyarakat Boti Dalam Menjaga Ketahanan Pangan dan Bencana. *Handep Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No.2, 199-220.
- Li, T. M. (2002). *Keterpinggiran, Kekuasaan, dan Produksi: Analisis Terhadap Transformasi Daerah Pedalaman, Dalam Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mariyani, S., Pandjaitan, N. K., & Sihaloho, M. (2019). Resiliensi Komunitas Petani Sawah Tadah Hujan terhadap Ancaman Kerawanan Pangan Akibat Perubahan Iklim (Kasus Lampung Selatan). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 7, No. 3, 236-250.
- Nasdian, F. T., Pandjaitan, N. K., & Barlan, Z. A. (2020). Resiliensi Komunitas Kawasan Pertambangan dan Kerawanan Pangan di Kalimantan Selatan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 08, Vol. 01, 47-63.
- Ningsih, A. M. (2019). Fenomena Resiliensi Suku Semende Desa Aromantai. *Prosiding Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota-SPeSIA*, Vol.5, No.1, 158-162.
- Permana, R. C. (2009). Masyarakat Baduy dan Pengobatan Tradisional Berbasis Tanaman. *Jurnal Wacana*, Vol. 11, No. 1, 81-94.
- Prastowo, J. (2014). *Ekonomi Insani: Kritik Karl Polanyi Terhadap Sistem Pasar Bebas*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Siscawati, M. (2014). Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan. *Wacana*, No.33, Tahun XV, 3-23.
- Spradley, J. P. (1997). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sunarno, & Sulistyowati, E. (2021). Resiliensi Komunitas di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Media-psi*, Vol. 7, No. 1, 37-52.

Tamyis, A. R., Wikan, H., & Mawardi, M. S. (2021). *Kemiskinan & Ketimpangan DKI Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali*. . Catatan Isu SMERU No. 2.

Wawancara

Hado, A. (2021, September 5). Pemangku Adat.

Nasi'. (2021, September 19). Pemangku Adat.

Hendra. (2021, Agustus 21). Masyarakat Adat.

Hasan. (2021, September 12). Petani.

Calle, S. (2021, September 18). Petani.